

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DI KOTA MEDAN**

TESIS



O L E H :

Z U L H A D I

NPM. 051801058

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 152 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
DI KOTA MEDAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Pada Program
Pascasarjana Universitas Medan Area**



O L E H :

Z U L H A D I

NPM. 051801058

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
MEDAN
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152
Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di
Kota Medan

Nama : Zulhadi

NIM : 051801058

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA


Drs. Usman Tarigan, MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Drs. Kariono, MA

Direktur


Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 09 Juni 2007



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Drs. Kariono, MA
Sekretaris	: Ir. Erwin Pane, MS
Pembimbing I	: Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA
Pembimbing II	: Drs. Usman Tarigan, MS
Penguji Tamu	: Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Hidayah dan Karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dari awal penulis menuntut ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area sampai dengan selesainya penulisan Tesis berjudul : *Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Kota Medan.*

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis belajar di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku pembimbing II sekaligus Bapak Drs. Kariono, MA sebagai Ketua Program Studi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Bapak Walikota Medan, atas izin belajar dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak serta Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.

Terima kasih dan salam kasihku untuk kedua orangtuaku dan keluargaku, yang tidak pernah putus asa memberikan semangat, tenaga serta materi yang tak terhingga dan mengalirkan doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2007

Penulis

ZULHADI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR	
TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	6
1.3. Tujuan penelitian	6
1.4. Manfaat Hasil penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Implementasi Kebijakan	9
2.2. Pengertian Pengelolaan Barang Daerah	18
BAB. III. METODE PENELITIAN	27
3.1. Bentuk Penelitian	27
3.2. Lokasi Penelitian.....	28

3.3. Populasi dan Sampel.....	28
3.4. Rencana Sampling	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data	29
3.6. Variabel dan Operasional Konsep	30
3.7. Tehnik Analisa Data.....	32
BAB. IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	34
4.1. Gambaran Umum Kota Medan.....	34
4.1.1. Kota Medan Secara Geografis	35
4.1.2. Kota Medan Secara Demografis.....	36
4.1.3. Kota Medan Secara Kultural	37
4.1.4. Kota Medan Secara Ekonomi	38
4.1.5. Kota Medan Secara Sosial	39
4.2. Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan.	40
BAB. V. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	42
5.1. Hasil Penelitian	42
5.1.1. Karakteristik Responden.....	42
5.1.2. Variabel Penelitian	46
5.2. Analisa Data	57
5.3. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Medan dalam rangka Peningkatan Penerapan Kepmendagri 152/2004	59

5.3.1. Peningkatan Kualitas pelayanan kepada pengguna barang.....	59
5.3.2. Peningkatan kinerja aparat pengelola barang milik daerah.....	60
5.4. Kontribusi Pengelola Barang Dalam melaksanakan Kepmendari nomor 152 tahun 2004	60
5.4.1. Pengamanan dan pemeliharaan barang	60
5.4.2. Sewa Menyewa.....	61
BAB. VI. KESIMPULAN DAN SARAN	62
6.1. Kesimpulan	62
6.2. Saran-saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah dalam segala bidang, maka diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam menjaga aset-aset daerah. Hal itu dapat dijalankan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, khususnya dalam rangka realisasi tugas otonomi daerah (otoda) yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan Personil, Pembiayaan dan Peralatan (Barang/Aset Daerah).

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah, sejalan dengan Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam UU tersebut, masalah Personil, Pembiayaan dan Peralatan (Barang/Aset Daerah) khususnya yang menyangkut perlengkapan/barang (aset) belum memperoleh pengaturan secara tegas. Sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan barang (aset) daerah sesuai dengan hak, wewenang dan tanggung jawab daerah sebagai daerah otonom. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 sebagai bagian dari perubahan atas Kepmendagri dan Otda No. 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Kepmendagri

ini dirasa perlu karena barang (aset) daerah merupakan sarana atau salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah disegala bidang khususnya pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai kenyataan, bahwa setiap tahunnya semakin bertambah besar anggarannya mengingat hampir 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk belanja barang, (Dinas Informasi dan Komunikasi Jatim, 25-11-2005)

Kepmendagri no. 152 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah tersebut memuat peraturan tentang pengelolaan barang (aset) mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan sampai dengan perubahan status hukum barang (aset) daerah dan lain-lain.

Pengelolaan barang (aset) agar optimal dapat dilakukan dengan cara inventarisasi aset, membuat database (SIMBADA), pemeliharaan barang daerah, pendataan potensi aset daerah, serta kerjasama/penyertaan modal. Aset-aset daerah yang dikelola dengan baik dapat mendukung produk pemerintah. Selain itu dapat mengoptimalkan pelayanan publik serta memberikan kontribusi yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan kontribusi ini bisa diperoleh dengan cara kerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward IR, 1980, *Implementation Public Policy*, Washinton DC ; Congressional Quarter Press.
- Dye, Thomas R, 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey; Prentice Hall
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Gunung Agung.
- Jones, Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta, Rajawali Press.
- Kepmendagri, No. 152 Tahun 2004, *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah* Depdagri, Jakarta.
- keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001, *Tentang Manual Administrasi Barang daerah*, Depdagri, Jakarta.
- Rian Nugroho,D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implemntasi dan Evaluasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 6 Tahun 2004, *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, CV. Eka Jaya, Jakarta.
- Peraturan Bupati Gayo Lues, Nomor 02 tahun 2005, *Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah kabupaten Gayo Lues*. Pemdakab. Gayo Lues.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004, *Tentang Pedoman Nomor Kode Kendaraan bermotor*, Depdagri, Jakarta.
- Singaribun, M. Dan sofyan E, 1999, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sugyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung , Alfabeca
- Surbakti, Manggung, 2001. *Diktat Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*, Pempropsu, Badan diklat.
- Tangkilisan, Nogi S. Hessel, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Kerjasama Lukman Ofset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Toha, Miftah, 1991. *Perspektif Prilaku Birokrasi*, Jakarta, Rajawali

Wahab, Solihin Abdul, 1990, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Malang; Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 22 TAHUN 2003

T E N T A N G

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Medan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, telah dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Medan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 28 Tahun 2002;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pelayanan administrasi sebagai unsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berkaitan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka perlu pembagian tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari tiap-tiap satuan organisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Medan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir b di atas maka tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973, tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan

Pasal 110

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 12 Juni 2003

WALIKOTA MEDAN,

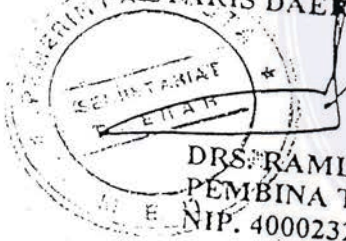
Dto,

DRS. H. ABDILLAH Ak, MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Nomor : 12 Seri E Tahun 2003
Tanggal : 12 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



DRS RAMLI, MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 400023264